

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input type="checkbox"/> Republika       | <input checked="" type="checkbox"/> Fajar  |

**TANGGAL** 23/11/2019  
**HALAMAN** 4 /  
**RUBRIKASI**  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

## Klaim Asuransi Petanian Naik Seratus Persen

**MAKASSAR, FAJAR**—Dampak kerugian akibat kemarau panjang nampaknya dirasakan betul petani di Sulsel. Hal tersebut tercermin meningkatnya klaim asuransi dari Jaminan Asuransi Indonesia (Jasindo) kepada petani.

Kepala Cabang Asuransi Jasindo Makassar, Yoshika Lesmana, mengatakan, yang berproses sampai dengan November berjalan terhitung klaim telah mencapai Rp9 miliar. Total kerugian 1.500 hektare lahan pertanian.

Yoshika menyebut, nilai tersebut meningkat pesat. Bahkan kenaikannya 100 persen, jika dibandingkan 2018 lalu. *Jf 23/11/19*

Walaupun kata Yoshika, memang tak seluruhnya akibat kemarau. Sebagian juga akibat bencana banjir di awal tahun 2019. "Tapi tetap didominasi karena kemarau," ujarnya, Jumat, 22 November.

Menurut Yoshika, premi yang terserap sampai sekarang nilainya Rp13 miliar. Dia menyebut, pada dasar-

nya jumlah lahan yang telah terdaftar di Jasindo itu masih sangat minim.

Dari total lahan 651 ribu hektare persawahan Sulsel, baru sekira 5.756 hektare yang terlindungi asuransi. Artinya baru sekira 10 persen.

Itupun kata dia, itu didorong oleh kerja sama antara pemerintah dengan Jasindo. Sedangkan untuk kepesertaan mandiri masih sangat sedikit.

Kondisi itu juga bisa dilihat dari data pemerintah Sulsel yang mencatat terdapat 3.700 hektare padi yang puso dan 2.000 hektare persawahan yang mengalami kekeringan.

Artinya jika dibandingkan

dengan total yang di klaim Jasindo, maka petani yang mengalami kerugian dan mendapat perlindungan asuransi tak sampai separuh. Sangat minim.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura, Nur Fitriani, juga mengakui masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-asuransi. Namun, pemerintah selalu dihimbau untuk bisa membantu petani untuk membantu petani.

"Sudah ada beberapa kabupaten yang menerapkan. Salah satunya Kabupaten Bantaeng," katanya. **(mum/iad)**

**MEDIA**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input type="checkbox"/> Republika       | <input checked="" type="checkbox"/> Fajar  |

**TANGGAL** 21/11/2019

**HALAMAN** 6 / 1

- RUBRIKASI**
- Berita
  - Berita Foto
  - Opini/Artikel
  - Tajuk
  - Pojok/Karikatur

## Perempuan dan Pangan

**K**onon pada zaman kerajaan Romawi dan Yunani sedang berjaya-jayanya, negeri ini pernah menghadapi ancaman kelaparan akibat semua tanaman pangan mati. Selain meminta bantuan para dewa-dewa, pihak kerajaan juga meminta bantuan kaum perempuan untuk menyelamatkan warganya. Sebab, perempuan bukan hanya membantu di ladang-ladang, tetapi juga turut menentukan manajemen penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan makanan di masing-masing rumah tangga. *Fjr. 21/11/16*

Apa yang dilakukan kaum perempuan untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan? Bagaimana persoalan sebuah bangsa yang sangat krusial bisa diatasi oleh kaum perempuannya. Sebenarnya sangat sederhana, hanya mengatur penghematan konsumsi makanan di rumah mereka, sehingga tidak lagi berlebihan yang cenderung boros pemakaian bahan makanan dan malah tidak sehat. Pengurangan jumlah makan yang dikonsumsi atau bahan pangan yang diolah jadi akan sangat signifikan membantu mengurangi krisis pangan atau memperlambat datangnya bencana kelaparan.

Aturannya sederhana, perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah pemimpin di rumah, sehingga dapat menjalankan imbauan masak secukupnya dan seluruh anggota keluarga ikut makan secukupnya. Alhasil, persediaan pangan mencukupi sampai cuaca kembali membaik, dan tanaman kembali menghasilkan bahan pangan.

Apayang dilakukan perempuan-perempuan tersebut, sebenarnya bisa dilakukan di negeri kita agar kita dapat mencapai kedaulatan pangan. Sebab ada dua cara untuk mencapai kedaulatan pangan, pertama kita meningkatkan produksi bahan pangan dalam

negeri, atau kedua mengurangi jumlah konsumsi bahan pangan secara benar. Atau melakukan kedua-keduanya, sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai dengan cepat.

Apakah perempuan di Indonesia berpotensi membantu pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan? Tentu sangat memungkinkan karena jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi, mencapai 266,91 juta jiwa, dan di antaranya sebanyak 132,89 adalah perempuan. Selain itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling banyak menyisakan bahan pangan, entah itu pada rumah tangga, restoran, atau pada tempat pesta.

Orang Indonesia kalau pesta, kadangkala menyiapkan makanan dalam jumlah berlebihan karena ingin memperlihatkan kemewahan kepada tamu-tamumereka. Biasanya yang mengatur semua konsumsi di pesta-pesta adalah kaum ibu-ibu. Mulai dari pemilihan menu hingga jumlah porsi makanan yang dipesan.

Makanya di Jakarta sudah muncul kelompok-kelompok yang mengumpulkan makanan yang tak tersentuh dari meja-meja di acara pesta untuk kemudian di daur ulang atau dimasak ulang menjadi makanan baru. Makan tersebut kemudian dipacking ulang untuk dibagikan ke orang-orang yang kurang beruntung.

Sepertinya, jika pemerintah ingin mewujudkan kedaulatan pangan dengan segera, sebaiknya menghitung ulang volume bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dengan takaran dari kualitas asupan gizi, bukan dari volume saja. Jika kita memang mengkonsumsi secara berlebihan, ada baiknya melibatkan kaum perempuan untuk mengubah pola masak dan makan masing-masing keluarga. (\*)



- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia    | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta              | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia  | <input type="checkbox"/> Koran Tempo                | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos          | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo              | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily    | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional   | <input type="checkbox"/> Pelita                     | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka             | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan            | <input type="checkbox"/> Republika                  |  |

**TANGGAL** 28 NOV 2019  
**HALAMAN** 9 / 20  
**RUBRIKASI**  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

### Satgas Pangan Polri Ingatkan Pedagang Jangan Bermain Harga

JELANG perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri bergandengan tangan dengan beberapa pemangku kepentingan untuk memantau stabilitas harga bahan pangan pokok di pasar. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan para pedagang dalam memainkan harga pangan pokok.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra memberikan dua imbauan kepada para pedagang. Pertama, tidak melakukan penimbunan yang berakhir pada kenaikan harga bahan pangan pokok.

"Karena ini akan melanggar UU tentang Pangan No 12 Tahun 2018," ujarnya di Mabes Polri, kemarin.

Imbauan kedua, para pedagang diminta tidak menjual bahan pangan pokok dengan menurunkan kualitas. Hal tersebut sudah diatur melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan.

Pemantauan harga pangan pokok dilakukan Satgas Pangan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan beberapa asosiasi pedagang.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ada indikasi dari pedagang di beberapa daerah untuk menaikkan harga bahan pangan pokok tersebut. Oleh sebab itu, kata Asep, ada beberapa daerah yang diberikan pengawasan khusus. Namun, pihaknya tidak merinci lebih jauh daerah yang dimaksud.

Pihaknya memastikan bahwa harga bahan pangan pokok di pasaran masih terpantau stabil. "Sampai dengan hari ini dilaporkan oleh Satgas Pangan bahwa harga bahan pokok masih dalam kondisi yang stabil," terang Asep. (Tri/J-3) M.G

### Beras Jakarta Aman untuk Natal-Tahun Baru

BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan pasokan dan stok pangan Jakarta selama masa Natal dan Tahun Baru masih aman. Frans M Tambunan, Direktur Operasional PT Food Station Tjipinang Jaya, Rabu (27/11/2019), menjelaskan, persiapan penyediaan stok pangan dilakukan sejak tiga bulan lalu. Komoditas yang disiapkan adalah beras, ikan kembung, telur ayam, gula pasir, susu UHT, tepung terigu, bawang putih, dan minyak goreng. Untuk beras, stok yang disiapkan 62.000 ton. Stok itu terdiri dari stok Pasar Induk Beras Cipinang sekitar 50.000 ton dan stok Food Station (FS) 12.000 ton. "FS bersama Bulog Kanwil Jakarta Banten juga menyiapkan beras 100.000 ton sampai bulan Maret 2020 sebagai antisipasi paceklik. Sekitar 40.000 ton beras juga didatangkan berkala dari Sulawesi sejak Oktober sampai Januari 2020," kata Frans. Stok pangan, antara lain, didistribusikan ke masyarakat melalui program ketahanan pangan, seperti pangan murah KJP Plus, pasar murah, dan beras untuk PNS DKI. (HLN) K-20

**MEDIA**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia          |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan              |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani                 |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya                |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input checked="" type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post           |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input type="checkbox"/> Republika       | <input type="checkbox"/> Fajar                      |

**TANGGAL** 27 NOV 2019  
**HALAMAN** 1  
**RUBRIKASI**  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

# Inovasi Teknologi Berperan Wujudkan Ketahanan Pangan

**[JAKARTA]** Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi canggih harus menyentuh sektor pertanian sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi itu harus masuk sektor pertanian karena selain meningkatkan produktivitas juga bisa membuat petani sejahtera dan semakin banyak orang tertarik untuk bertani.

Hal tersebut mengemuka di dalam diskusi terbuka bertema "Program Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan" yang digelar Lembaga Kajian Nawacita. Lembaga independen ini fokus pada pengembangan diskusi pembangunan di Indonesia berbasis komoditi pangan.

Hingga kini masalah pangan masih terus menjadi beban yang harus dicari solusinya melalui pembangunan pertanian yang maju dan berkeadilan. Dengan begitu, para pelakunya memperoleh pendapatan yang adil, lebih baik untuk



**Dari kiri ke kanan,** Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Agum Gumelar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Rhenald Kasali, Staf Pengajar LSPR Nico Wattimena, mantan Sekjen Kemdag Ardiansyah Parman, dan Ketua Pasar Komoditi Nasional Indonesia Hartono Wignjopranoto menjadi narasumber pada acara Forum Group Action (FGA) di Jakarta, Selasa (26/11).

kesejahteraan keluarganya. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Achmad Djamiludin mengatakan, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum semua dieksplorasi untuk menghasilkan komoditi pangan.

Memasuki tahapan kemajuan 4.0, maka perlu dilakukan inovasi bidang pangan, agar mampu mencukupi kebutuhan pangan. *SRS 27-11/19*  
 "Produksi beras agaknya tidak akan mencukupi kebutuhan. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi pangan nonberas yang selama

ini menjadi pangan pokok spesifik di masing-masing wilayah," katanya di Jakarta, Selasa (26/11).  
 Diversifikasi yang dimaksud bisa berupa sagu, jagung, dan ubi jalar yang sangat potensial sebagai pengganti beras. Posisi beras sebagai pangan yang



**MEDIA**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia          |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan              |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani                 |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya                |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input checked="" type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post           |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input type="checkbox"/> Republika       | <input type="checkbox"/> Fajar                      |

- TANGGAL** 27 NOV 2019  
**HALAMAN** 19  
**RUBRIKASI**  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

bergengsi harus dikikis dengan pengertian tentang pangan lain yang bernilai gizi baik. Ia menambahkan, sagu di Papua mesti dipertahankan sebagai sumber pangan spesifik Papua.

Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang memasukkan palawija sebagai produk pangan yang dikawal pemerintah. Kemudian dibutuhkan juga pengaturan zonasi lahan pertanian abadi, larangan monopoli, pembangunan jaringan pemasaran, pengembangan teknologi pangan nonberas, serta peran laboratorium sebagai mitra strategis pangan.

“Berikutnya infrastruktur kawasan pertanian harus dibangun agar angkutan pangan dari kebun ke pasar menjadi lancar,” ucapnya.

**Jumlah Penduduk**

Guru Besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renald Kasali berpandangan, inovasi teknologi bidang pangan perlu dikembangkan agar mampu mencukupi kebutuhan pa-

ngan secara baik.

“Memasuki tahapan kemajuan teknologi 4.0, perlu dilakukan inovasi bidang pangan, yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri yang berbasis pertanian,” katanya.

Menurut Rhenald, penggunaan teknologi canggih seperti, ponsel pintar, big data, pengingat pintar buatan, *cloud computing*, serta sensor pengendali data awal mesti diterapkan dan digunakan dengan baik.

Saat ini, ia menambahkan tantangan pangan yang dihadapi Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk yang berlawanan dengan menyusutnya lahan pertanian sekitar 100.000 hektare (ha) per tahun.

Belum lagi pangan yang mengandalkan panen musiman dan menjadi catatan tersendiri di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk.

“Inovasi adalah kata kunci dalam bisnis terutama dalam rangka menciptakan pasar,” ucapnya. [R-15]

2

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta        | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo          | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo        | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input type="checkbox"/> Media Indonesia      | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita               | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka       | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar             |

**TANGGAL** 28 NOV 2019  
**HALAMAN** 6  
**RUBRIKASI**  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

# WTO dan Ketahanan Pangan

● **ERWIDODO**

Peneliti Senior Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Dubes RI Urusan WTO Periode 2008-2012

**T**ulisan ini bertujuan meluruskan pernyataan dan pandangan "ku-rang tepat" terhadap keberadaan World Trade Organization (WTO) dan keanggotaan Indonesia di WTO yang dikutip media massa dari sidang Komisi IV DPR beberapa waktu lalu.

Pemahaman yang benar sangat penting, agar para pihak lebih tepat menyikapi keanggotaan Indonesia di WTO dan memanfaatkan WTO secara maksimal untuk mendukung pembangunan pertanian, khususnya dalam mencapai ketahanan pangan berkemandirian.

WTO merupakan organisasi antarnegara yang mengelola dan menegakkan aturan perdagangan multilateral. Aturan WTO mengikat seluruh anggota dan menjamin diterapkannya prinsip perdagangan nondiskriminatif.

Terutama terdiri atas *most favoured nation* (MFN), yakni kesamaan kedudukan (produk) semua negara dan prinsip *national treatment* (NT), yakni kesamaan kedudukan antara produk impor dan produk dalam negeri.

Kebijakan perdagangan setiap negara anggota WTO harus memenuhi dan/atau menerapkan kedua prinsip tersebut. Jadi, keliru kalau ada pandangan WTO menzalimi Indonesia atau merupakan alat negara maju menekan dan merugikan negara berkembang.

Aturan WTO dirancang untuk meningkatkan akses pasar melalui penurunan hambatan perdagangan, memberikan kepastian hukum melalui proses penyelesaian sengketa dagang, memfasilitasi pembangunan di negara berkembang dan belum berkembang melalui *special and differential treatment*.

Indonesia menjadi anggota GATT sejak 1950 dan pendiri WTO tahun 1994. Sampai Desember 2017, anggota WTO berjumlah 164 negara, yang terdiri atas 128 negara anggota sekaligus pendiri termasuk Indonesia dan 36 negara anggota yang melalui proses akses (pendaftaran).

Cina dan Rusia menjadi anggota melalui proses akses yang berlangsung lebih dari 10 tahun dan baru diterima sebagai anggota WTO pada 2001 dan 2012. Saat ini, semua anggota ASEAN telah menjadi anggota WTO.

Sampai 2018, ada 23 negara masih berstatus *observer*, menunggu giliran proses akses menjadi anggota. Fakta ini menegaskan, kian banyak negara menjadi anggota WTO maka patut disayangkan jika ada yang mewacanakan Indonesia "keluar" WTO.

UU Nomor 7 Tahun 1995 tentang ratifikasi pembentukan WTO menjadi dasar hukum keanggotaan Indonesia di WTO dan sejak saat itu semua aturan WTO menjadi aturan-perundangan.

Karena itu, semua pihak di Indonesia harus dapat mengambil manfaat maksimal dari keanggotaan Indonesia di WTO. Untuk itu perlu pemahaman aturan WTO, termasuk tentang hak dan kewajiban anggota.

**Sengketa dagang**

Penting dipahami, proses penyelesaian sengketa di Dispute Settlement Body (DSB-WTO) adalah proses pengadilan bukan negosiasi.

Ini bertujuan membuktikan dan memutuskan, apakah kebijakan perdagangan yang diterapkan pemerintah negara tergugat konsisten atau melanggar aturan WTO berdasarkan bukti-bukti empiris, argumentasi ilmiah, dan fakta hukum.

Dalam dokumentasi DSB-WTO, selama kurun 1996-2018, Indonesia mengalami 14 kali gugatan dan sebaliknya selama periode sama, Indonesia tercatat 11 kali menjadi penggugat dalam proses sengketa di WTO.

Data di DSB-WTO memperlihatkan, negara tergugat selalu kalah dalam proses penyelesaian sengketa. Mengapa? Karena tim penasihat hukum negara penggugat sebelum mengajukan gugatan melakukan kajian mendalam atas kebijakan negara tergugat.

Mereka baru mengajukan gugatan setelah mengetahui memiliki kasus kuat untuk menang gugatan. Kekalahan Indonesia dalam putusan panel kasus DS477/DS478 perlu jadi pembelajaran dalam perumusan kebijakan pembatasan impor produk pertanian ke depan.

Diperlukan analisis tingkat kesesuaian dengan aturan WTO sebelum kebijakan menjadi regulasi pemerintah. R. L.

Disadari atau tidak, kebijakan dan strategi substitusi impor di sektor pertanian sering memaksa pemerintah menerapkan kebijakan protektif dengan cara melakukan pembatasan dan/atau pelarangan impor pangan.

Aturan WTO tidak melarang negara anggota menerapkan kebijakan pembatasan impor sepanjang menggunakan instrumen dan tindakan yang konsisten dengan aturan WTO yang berlaku.

Aturan WTO pun tidak melarang negara anggota, termasuk Indonesia, mencapai ketahanan pangan berkemandirian. Namun, untuk mencapainya, negara anggota perlu menerapkan kebijakan perdagangan yang konsisten dengan aturan WTO yang berlaku.

Untuk mencapai ketahanan pangan berkemandirian, saatnya Indonesia mengubah strategi pembangunan pertanian (pangan) tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga ekspor.

**Strategi promosi ekspor**

Strategi promosi ekspor akan mengondisikan kegiatan produksi pertanian mengacu pada prinsip efisiensi dan daya saing.



- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta        | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo          | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo        | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input type="checkbox"/> Media Indonesia      | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita               | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka       | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar             |

TANGGAL 28 NOV 2019  
 HALAMAN 6 / 1  
 RUBRIKASI  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

Strategi substitusi impor, yakni meningkatkan produksi domestik untuk menekan impor, sering dilakukan tanpa mempertimbangkan efisiensi dengan target "tidak lagi impor". Target itu menjebak pertanian pangan kita berproduksi secara tidak efisien.

Kebijakan substitusi impor, memaksa pemerintah menerapkan perdagangan "protektif" karena produksi pangan dalam negeri tidak berdaya saing, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Contohnya, kebijakan substitusi impor sektor perunggasan.

Saat terjadi surplus produksi daging ayam, langkah pemerintah/pelaku industri unggas adalah dengan "simply" memangkas produksi melalui pengurangan/pemusnahan DOC, tidak mencari *outlet* di pasar ekspor.

Ini karena surplus produksi daging ayam tak mungkin laku dan bersaing di pasar ekspor karena harga produsen daging ayam di Indonesia pada 2017 sebesar 2,1 dolar AS/kg, hampir dua kali lipat dari Thailand, yakni 1,09 dolar AS/kg (FAOstat, 2017).

Situasi berbeda ini diperkirakan akibat perbedaan strategi dan kebijakan pembangunan industri peternakan. Thailand menerapkan strategi promosi ekspor, sedangkan Indonesia substitusi impor dari dulu sampai saat ini.

Orientasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan target menekan (tidak) impor telah membuat pelaku usaha tidak berkepentingan memikirkan perlunya pasar ekspor sehingga mereka mengabaikan prinsip efisiensi produksi dan biaya serta mutu produk.

Para pelaku usaha perunggasan merasa yakin, daging ayam (telur) yang diproduksi pasti laku dijual di pasar domestik dan pemerintah setiap saat siap memproteksi mereka dari persaingan dengan produk impor.

Agar tak mengulangi kesalahan, saatnya orientasi dan strategi pembangunan pertanian diubah menjadi strategi promosi ekspor yang mengacu prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif. Langkah sama perlu dilakukan di sektor riil lainnya.

Jika langkah ini diambil pemerintah, termasuk di pertanian, alergi pada WTO berangsur sirna dan saatnya para pihak pertanian di Indonesia lebih proaktif memanfaatkan WTO dalam meningkatkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. ■